

BAB IV

PERGESERAN RELASI KORPORASI TERHADAP *COMMUNITY* DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM *COMDEV*

A. Pengantar

Bab ini membahas mengenai pergeseran relasi sosial korporasi terhadap *community* dalam implementasi program *comdev* PT. T di Desa Puserjaya. Pembahasan pertama dalam bab ini mengenai posisi dan sikap *stakeholder* terhadap perusahaan dalam pelaksanaan program *community development*. Tidak bisa dipungkiri program *comdev* yang dilakukan oleh PT. T dengan menempatkan komunitas lokal sebagai *stakeholder* utama telah membentuk sikap serta posisi dari *community* dan *government stakeholder* terhadap perusahaan. Sikap *stakeholder* terhadap perusahaan dapat diidentifikasi menjadi beberapa indikator yaitu *mendukung, menolak, netral, tergantung kepentingan, dan tidak jelas*. Dalam hal ini, penulis akan mengidentifikasi sikap dari masing-masing *stakeholder* terhadap perusahaan, yang didasarkan pada kompensasi (*reward*) yang diberikan oleh komunitas lokal dan pemerintah setempat melalui pelaksanaan program *comdev*.

Pembahasan kedua dalam penelitian ini membahas peran dari masing-masing elemen *stakeholder*. Pelaksanaan program *community development* PT. T di Desa Puserjaya, melibatkan berbagai unsur elemen *stakeholder* yang terkategoriisasi menjadi tiga macam yaitu *Government Stakeholder, Community Stakeholder* dan *Corporation Stakeholder*. Masing-masing elemen *stakeholder* tersebut memiliki

posisi dan peran yang harus dimainkan guna menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dinamika kehidupan masyarakat Desa Puserjaya. Penulis mengidentifikasi peran dari masing-masing elemen *stakeholder* tersebut ke dalam beberapa kategori yaitu sebagai subyek pelaksana program (*Corporation Stakeholder*), supervisi pelaksanaan program (*Government Stakeholder*), dan subjek sekaligus obyek dalam pelaksanaan program (*Community Stakeholder*).

Bagian ketiga dalam penelitian ini membahas mengenai relasi yang terjadi antara korporasi terhadap *community stakeholder* dan *government stakeholder* di Desa Puserjaya. Analisa mengenai relasi tersebut, penulis lakukan dengan membandingkan relasi perusahaan yang berlangsung selama dua periode yaitu pada tahun 1989-2005 dan relasi perusahaan periode tahun 2005- sekarang. Hal tersebut penulis lakukan untuk memperjelas pergeseran relasi sosial yang terjadi antara perusahaan dengan *community* dan *government stakeholder*. Periode tahun 1989-2005, fokus dari sasaran implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan lebih diarahkan untuk menjalin relasi dengan pemerintah setempat (Pemkab Karawang, Kecamatan Telukjambe, dan Desa Puserjaya). Kondisi tersebut menimbulkan hubungan yang timpang antara perusahaan dengan komunitas lokal Desa Puserjaya, karena pada periode tersebut kebijakan perusahaan cenderung lebih condong ke *Government Stakeholder*.

Sementara itu, pada periode tahun 2005 hingga sekarang, terjadi pergeseran relasi yang cukup signifikan. Program-program sosial perusahaan lebih diarahkan untuk menjawab kebutuhan komunitas lokal, sehingga menciptakan hubungan sosial yang saling menguntungkan. Selain membahas relasi yang terjadi selama dua periode tersebut, dalam bab ini penulis juga akan mengidentifikasi pertukaran sosial yang terjadi antara perusahaan PT. T dengan *Community* dan *Government Stakeholder*, serta kelompok kepentingan sebagai wujud hubungan sosial yang terjadi antar elemen *stakeholder*. Penulis juga akan mengidentifikasi *Feedback* (*Reward* Intrinstik dan *Reward* Ekstrinstik) yang diberikan oleh *community* dan *government stakeholder* terhadap perusahaan. Bab ini akan ditutup dengan pembahasan mengenai refleksi pelaksanaan program *comdev* PT. T di Desa Puserjaya.

B. Sikap *Stakeholder* (*Government* dan *Community Stakeholder*) Terhadap Perusahaan Terkait Dengan Pelaksanaan Program *Comdev*

Program *community development* yang dilaksanakan oleh PT. T melibatkan berbagai unsur elemen *stakeholder*, mulai dari *community stakeholder* (karang taruna dan LSM) dan *government stakeholder* (Pemerintah Desa, Kecamatan dan Pemkab Karawang). Pelibatan unsur elemen *stakeholder* tersebut dalam pelaksanaan program *community development* yang meliputi tiga bidang yaitu pendidikan ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, dan sosial kemasyarakatan, lebih diarahkan untuk menciptakan legitimasi dari komunitas lokal (karang taruna) dan pemerintah setempat. Selain itu, keterlibatan elemen *stakeholder* tersebut juga dimaksudkan untuk membentuk sikap dari masing-masing *stakeholder* terhadap aktivitas sosial dan

aktivitas produksi yang dijalankan oleh perusahaan. Sikap dari masing-masing elemen *stakeholder* tersebut dikategorisasi menjadi lima macam yaitu mendukung, menolak/konflik, netral, tidak jelas dan tergantung kepentingan.

Sikap *stakeholder* tersebut merupakan gambaran dari hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan komunitas, karena pada dasarnya keberadaan perusahaan sangat mempengaruhi keadaan lingkungan di sekitarnya yang memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik diantara keduanya. Persepsi *stakeholder* terhadap perusahaan lebih dilatarbelakangi oleh seberapa besar kontribusi perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya, salah satunya melalui pelaksanaan program *community development*. Implementasi kegiatan sosial yang sudah dijalankan oleh PT. T sejak tahun 1989 telah membentuk sikap *stakeholder* (*Government* dan *Community Stakeholder*) terhadap perusahaan. Sikap *stakeholder* terhadap keberadaan PT. T di wilayah Desa Puserjaya, bersifat dinamis dan mengalami dinamika yang cukup kompleks. Hal ini disebabkan karena terjadi perbedaan sasaran dalam implementasi program *comdev*.

Periode tahun 1989-2005, kegiatan tanggung jawab sosial yang dijalankan oleh PT. T hanya difokuskan untuk menjalin relasi dengan pemerintah daerah di sekitar wilayah Desa Puserjaya, antara lain Pemerintah Desa Puserjaya, Pemerintah Kabupaten Karawang, dan Kecamatan Telukjambe Timur. Pada periode tersebut komunitas lokal lepas dari perhatian perusahaan, dalam arti bantuan-bantuan sosial digulirkan melalui pemerintah daerah setempat. Akibatnya, timbul dua sikap yang

saling berbeda antara *government stakeholder* dan *community stakeholder* selama kurun waktu tahun 2002-2005. Sikap *Government Stakeholder* yakni mendukung kegiatan dan keberadaan perusahaan di Desa Puserjaya. Sementara itu, sikap dari komunitas lokal Desa Puserjaya terhadap perusahaan cenderung menolak, karena perusahaan dianggap hanya mementingkan kepentingan dari Pemerintah Daerah setempat.

Sikap menolak yang ditunjukkan oleh Karang Taruna tidak termanifestasi dalam aksi demonstrasi, melainkan hanya melakukan sikap protes terhadap perusahaan karena program sosial perusahaan tidak menyentuh komunitas lokal, dan pelaksanaan program melalui pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah Desa Puserjaya dan Kecamatan Telukjambe. Sementara itu, hubungan antara *government stakeholder* dengan perusahaan cenderung berjalan cukup baik. Hal ini disebabkan karena sejak PT. T berdiri di Desa Puserjaya, program tanggung jawab sosial perusahaan yang pada waktu itu masih dijalankan oleh *Divisi Public Relation*, lebih memfokuskan untuk menjalin relasi dengan Pemerintah Daerah setempat yang meliputi Desa Puserjaya, Kecamatan Telukjambe dan Kabupaten Karawang.

Selain itu, sebelum masa reformasi kedudukan pemerintah cenderung lebih kuat, sehingga perusahaan lebih mementingkan untuk mendapatkan legitimasi dari pemerintah setempat. Sementara itu, sikap komunitas lokal Desa Puserjaya (Karang Taruna) dengan perusahaan lebih bersifat dinamis. Kondisi ini disebabkan karena

perusahaan baru melibatkan komunitas lokal dalam program tanggung jawab sosial perusahaan mulai periode tahun 2005.

1. Analisa Sikap *Government Stakeholder* Terhadap Perusahaan

Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang sudah dijalankan sejak tahun 1989, secara tidak langsung telah membentuk pandangan dari pemerintah setempat jika perusahaan memiliki kemauan untuk membina hubungan dengan elemen pemerintahan di Kabupaten Karawang. Hubungan antara perusahaan PT. T dengan pemerintah Desa Puserjaya, Kecamatan Telukjambe dan Pemkab Karawang telah berlangsung cukup lama. Hal ini disebabkan karena sejak tahun 1989-2005, fokus dari kegiatan sosial perusahaan ditujukan kepada pemerintah setempat. Beberapa program *community development* yang di arahkan untuk menjalin relasi dengan pemerintah setempat antara lain mendukung *event-event* yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Event yang didukung oleh perusahaan terbagi menjadi tiga macam yaitu *event* di Tingkat Kabupaten, *event* di Tingkat Kecamatan, dan *event* di Tingkat Desa. *Event* di Tingkat Kabupaten, perusahaan mendukung acara HUT Kabupaten Karawang yang rutin diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang setiap tahun. Bentuk dukungan tersebut antara lain dengan memberikan bantuan dana acara dan mendirikan *booth* PT. T di acara tersebut. *Event* di Tingkat Kecamatan, perusahaan selalu menjadi sponsor untuk kontingen kecamatan telukjambe dalam event Pekan Olahraga Kabupaten Karawang (PORKAB), sunatan massal dan pengobatan gratis.

Selain itu, perusahaan juga memberikan dana bantuan operasional wilayah untuk Desa Puserjaya dan Kecamatan Telukjambe. Bantuan operasional wilayah ini mulai diberikan sejak tahun 2002 hingga sekarang. Memberikan bantuan sosial yang bersifat rutin seperti pemberian paket sembako pada hari raya idul fitri dan pemberian hewan Qurban pada hari raya idul adha.

Program-program yang bersifat *philantrophy* tersebut merupakan strategi perusahaan dalam menjalin relasi atau membangun hubungan yang harmonis dengan pemerintah setempat. Salah satu tujuan utama pelaksanaan program tanggung jawab sosial tersebut yaitu memperkuat legitimasi perusahaan dimata pemerintah, sehingga sikap pemerintah terhadap perusahaan mendukung kegiatan perusahaan.

Tabel 4.1.

Identifikasi Sikap dari Government Stakeholder Terhadap Perusahaan

No	Government Stakeholder	Sikap	Bentuk Sikap
1	Desa Puserjaya	Mendukung	-Mendukung keberlangsungan usaha produksi perusahaan -Apresiasi terhadap perusahaan
2	Kecamatan Telukjambe	Mendukung	-Mendukung aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan -Apresiasi terhadap perusahaan
3	Pemkab Karawang	Mendukung	-Menjamin iklim usaha yang kondusif -Apresiasi terhadap perusahaan

Sumber: Hasil Analisa Penulis Berdasarkan Data Dari *Comdev* PT. T. Tahun 2012

Tabel 4.1 diatas memperlihatkan jika ketiga elemen *government stakeholder* tersebut memiliki sikap mendukung terhadap keberadaan PT. T di wilayah Desa Puserjaya. Sikap dukungan *government stakeholder* tersebut dapat diidentifikasi atau

ditunjukkan dalam beberapa bentuk sikap antara lain mendukung keberlangsungan usaha produksi PT. T di Kawasan Industri KIIC, dengan cara menjamin iklim usaha yang kondusif di Desa Puserjaya.

2. Analisa Sikap *Community Stakeholder* Terhadap Perusahaan

Berbeda dengan sikap *government stakeholder* yang cenderung mendukung keberadaan perusahaan, sikap dari *community stakeholder* (Karang Taruna Desa Puserjaya dan Karang Taruna Kecamatan Telukjambe Timur) terhadap perusahaan mengalami dinamika yang cukup kompleks, mulai dari awalnya menolak hingga mendukung kegiatan perusahaan. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi perbedaan sikap dari *community stakeholder* di Desa Puserjaya terhadap aktivitas sosial yang dijalankan oleh PT. T, antara lain: pertama, dari periode tahun 1989-2005, komunitas lokal tidak tersentuh dan tidak dilibatkan dalam program sosial perusahaan. Dalam arti kegiatan sosial yang dijalankan oleh perusahaan mekanismenya melalui pemerintah setempat.

Kondisi ini berakibat timbulnya sikap skeptis dari komunitas lokal (Karang Taruna) di Desa Puserjaya yang beranggapan jika perusahaan hanya mementingkan kepentingan dari pemerintah saja. Kedua, tidak terakomodasinya keinginan dan kepentingan dari komunitas lokal Desa Puserjaya. Kepentingan Karang Taruna Desa Puserjaya terhadap perusahaan mencakup beberapa bidang yaitu pendidikan dan ketenagakerjaan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sikap menolak terhadap aktivitas sosial perusahaan yang terlalu condong hanya ke

pemerintah, ditunjukkan oleh karang taruna mulai dilakukan sejak periode tahun 2002-2005. Setidaknya selama tiga tahun tersebut terjadi disharmonisasi antara *community stakeholder* (dalam hal ini Karang Taruna Desa Puserjaya) dengan *government stakeholder* (pemerintah Desa Puserjaya), dan Perusahaan.

Bentuk disharmonisasi antara karang taruna dengan *government stakeholder* yaitu adanya keinginan transparansi dari karang taruna Desa Puserjaya mengenai bantuan-bantuan sosial dari perusahaan, karena selama periode 1989-2005, tiak ada laporan pertanggungjawaban dari pemerintah setempat terhadap akifitas tanggung jawab sosial dari perusahaan. Sedangkan bentuk disharmonisasi antara perusahaan dengan komunitas lokal yaitu adanya aksi protes dengan tuntutan pelibatan komunitas lokal dalam program *community development*. Setidaknya terjadi tiga kali protes sosial yang dilakukan oleh komunitas lokal Desa Puserjaya terhadap perusahaan. Aksi protes tersebut tidak dilakukan dengan melalui aksi unjukrasa, tetapi dilakukan melalui perundingan terhadap perusahaan mengenai program *community development*.

Komunitas lokal Desa Puserjaya juga sempat mengancam akan melakukan aksi demonstrasi di depan perusahaan jika komunitas lokal masih belum dilibatkan dalam program *community development*. Tidak bisa dipungkiri, menguatnya posisi tawar komunitas lokal setelah era reformasi telah merubah paradigma PT. T dalam memandang keberadaan komunitas tersebut. Posisi tawar Karang Taruna Desa Puserjaya semakin kuat ketika mendapat dukungan dari berbagai elemen organisasi

lain seperti Karang Taruna Kecamatan Telukjambe Timur dan dua LSM di sekitar Desa Puserjaya yaitu, LSM Gibas dan Brigez. Afiliasi antar *community stakeholder* tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan posisi dari komunitas lokal di Desa Puserjaya semakin diperhitungkan keberadaannya.

Oleh karena itu, legitimasi sosial dari komunitas lokal sangat dibutuhkan untuk menghindari sikap antipati terhadap keberadaan perusahaan yang dapat diwujudkan dalam beberapa tindakan seperti aksi protes dan demonstrasi. Terlebih lagi, pada tahun 2010 perusahaan juga memiliki rencana untuk memperluas areal pabrik di Karawang Internasional Industrial City (KIIC). Sikap mendukung dari komunitas lokal dan kelompok kepentingan sangat dibutuhkan untuk memperlancar pembangunan perluasan areal pabrik tersebut. Sikap dari *community stakeholder* terhadap keberadaan perusahaan di wilayah Desa Puserjaya dapat digambarkan pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2.

Identifikasi Sikap dari *Community Stakeholder* Terhadap Perusahaan

No	<i>Community Stakeholder</i>	Sikap	Bentuk Sikap
1	Karang Taruna Desa Puserjaya	Mendukung	-Bekerjasama dalam beberapa program <i>comdev</i> (<i>Sosial, Pendidikan, Pemberdayaan</i>) -Tidak melakukan aksi protes -Menjadi mitra bagi perusahaan
2	Karang Taruna Kecamatan Telukjambe Timur	Mendukung	-Bekerjasama dalam perekrutan tenaga kerja lokal melalui Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) -Tidak melakukan aksi protes

Sumber: Hasil Analisa Penulis Tahun 2012

Strategi program *community development* PT. T yang menempatkan komunitas lokal Desa Puserjaya sebagai *stakeholder* utama mulai periode tahun 2005, telah merubah paradigma komunitas lokal, dari menolak aktivitas sosial perusahaan menjadi mendukung. Tabel 4.2 diatas memperlihatkan jika elemen *community stakeholder* tersebut mengalami perubahan sikap terhadap keberadaan perusahaan dari menolak keberadaan perusahaan menjadi mendukung aktivitas perusahaan baik aktivitas industri maupun aktivitas sosial yang tercermin dalam program *community development*. Bentuk dukungan dari *community stakeholder* tersebut dapat dididentifikasi kedalam beberapa sikap antara lain, tidak melakukan aksi protes terhadap perusahaan. Kedua, menjadi mitra dan bekerjasama dengan perusahaan dalam beberapa bidang antara lain di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, bidang sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan komunitas.

Pada bidang pendidikan dan ketenagakerjaan perusahaan bersama dengan karang taruna membuat program bursa kerja lokal khusus untuk komunitas. Selain itu, perusahaan juga bekerjasama dengan karang taruna dalam hal perekrutan tenaga kerja lokal melalui Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang dibentuk oleh karang taruna Kecamatan Telukjambe. Kerjasama perekrutan tenaga kerja lokal ini sendiri baru berjalan selama 3 bulan mengingat lembaga tersebut baru diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2012. Di bidang pemberdayaan masyarakat perusahaan bekerjasama dengan karang taruna Desa Puserjaya dan Telukjambe

membuat program pemberdayaan berbasis komunitas seperti usaha bengkel motor, usaha cuci steam motor dan salon helm.

Berbeda dengan sikap dari *community stakeholder* yang mendukung aktivitas perusahaan, sikap dari kelompok kepentingan di wilayah Desa Puserjaya seperti LSM Gibas dan Brigez cenderung bersifat tergantung kepentingan, artinya sejauh kepentingan mereka terakomodasi oleh perusahaan maka sikap mereka cenderung mendukung, begitu juga sebaliknya. Keberadaan kelompok kepentingan di wilayah Desa Puserjaya menjadi salah satu pertimbangan perusahaan untuk menjalin relasi dengan kelompok kepentingan tersebut (LSM Gibas dan Brigez). Meskipun kepentingan dari kelompok tersebut tidak terlalu besar terhadap perusahaan, namun kelompok kepentingan tersebut memiliki hubungan dengan Karang Taruna Kecamatan Telukjambe dan Desa Puserjaya.

Tabel 4.3.

Identifikasi Sikap dari *Kelompok Kepentingan Terhadap Perusahaan*

No	Community Stakeholder	Sikap	Bentuk Sikap
1	LSM Brigez	Tergantung Kepentingan	-Tidak secara jelas mendukung dan menolak aktivitas perusahaan
2	LSM Gibas	Tergantung Kepentingan	-Tidak secara jelas mendukung dan menolak aktivitas perusahaan

Sumber: Hasil Analisa Penulis Tahun 2012.

Tabel 4.3 diatas memperlihatkan sikap “tergantung kepentingan” dari LSM Gibas dan Brigez. Sikap tergantung kepentingan ini muncul karena hubungan dan kepentingan antara perusahaan dengan kedua LSM tersebut tidak terlalu intens, dalam

arti hubungan sosial tersebut muncul jika hanya terjadi kepentingan diantara keduanya. Misalnya perusahaan mensupport event-event yang dilaksanakan oleh kedua LSM tersebut, seperti santunan anak yatim. Selain itu, perusahaan juga rutin memberikan bantuan dana tunjangan hari raya terhadap kedua kelompok kepentingan tersebut.

Perubahan strategi kebijakan program *comdev* yang dilakukan oleh PT. T dengan menempatkan karang taruna sebagai *stakeholder* utama dalam implementasi program *community development*, semakin menguatkan citra positif perusahaan dimata komunitas lokal dan pemerintah. Program *comdev* yang dijalankan lebih diarahkan untuk merespon tuntutan dan kepentingan dari komunitas lokal. Program-program *community development* tersebut merupakan representasi dari kepentingan masing-masing *stakeholder*.

C. Analisa Posisi dan Peran *Community* Serta *Government Stakeholder* Terhadap Pelaksanaan Program *Community Development* PT. T

Pada dasarnya, keberadaan PT. T di wilayah Desa Puserjaya merupakan bagian dari sistem masyarakat yang memiliki kedudukan dan peran dalam relasi antara perusahaan dengan elemen *stakeholder* di sekitarnya. Bagi korporasi, eksistensi perusahaan di tengah lingkungan masyarakat yang lebih luas tidak dapat dipisahkan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan keberadaan elemen *stakeholder* di sekitar lingkungan perusahaan. Sebagai bagian dari sistem yang keberadaannya terdapat interdependensi dengan lingkungan sekitar, perusahaan

memiliki kedudukan dan peran yang harus dimainkan. Peran tersebut secara internal merupakan upaya mempertahankan tujuan perusahaan yaitu keberlanjutan usaha, salah satunya melalui pelaksanaan program *community development*.

Sementara bagi komunitas lokal, keberadaan perusahaan memberikan kesempatan atau peluang untuk bisa bekerjasama dengan perusahaan menyelesaikan permasalahan sosial yang ada. Selain itu, keberadaan perusahaan juga dimanfaatkan untuk memenuhi tuntutan dan kepentingan dari komunitas yang selama ini belum terpenuhi. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, jika pelaksanaan program *comdev* yang dijalankan oleh PT. T melibatkan dua elemen *stakeholder* yaitu *community stakeholder* dan *government stakeholder*. Masing-masing elemen *stakeholder* tersebut, baik korporasi maupun *community* dan *government stakeholder* memiliki peran terkait dengan program *community development* yang dilaksanakan oleh PT. T. Adapun peran dari elemen *stakeholder* tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4.
Identifikasi Peran Elemen *Stakeholder* Terkait Program Comdev

Corporation Stakeholder	Government Stakeholder	Community Stakeholder
-Subyek program <i>comdev</i> . -Menentukan arah program, desain program dan strategi kebijakan pelaksanaan. -Menjaga keberlangsungan usaha dari protes sosial.	-Sebagai supervisi pelaksanaan program <i>comdev</i> .	-Objek sekaligus subjek program <i>comdev</i> . -Memberi masukan program <i>comdev</i> oleh perusahaan (program yang menjawab kebutuhan komunitas) -Monitoring pelaksanaan program <i>comdev</i>

Sumber: Hasil Analisa Penulis Tahun 2012

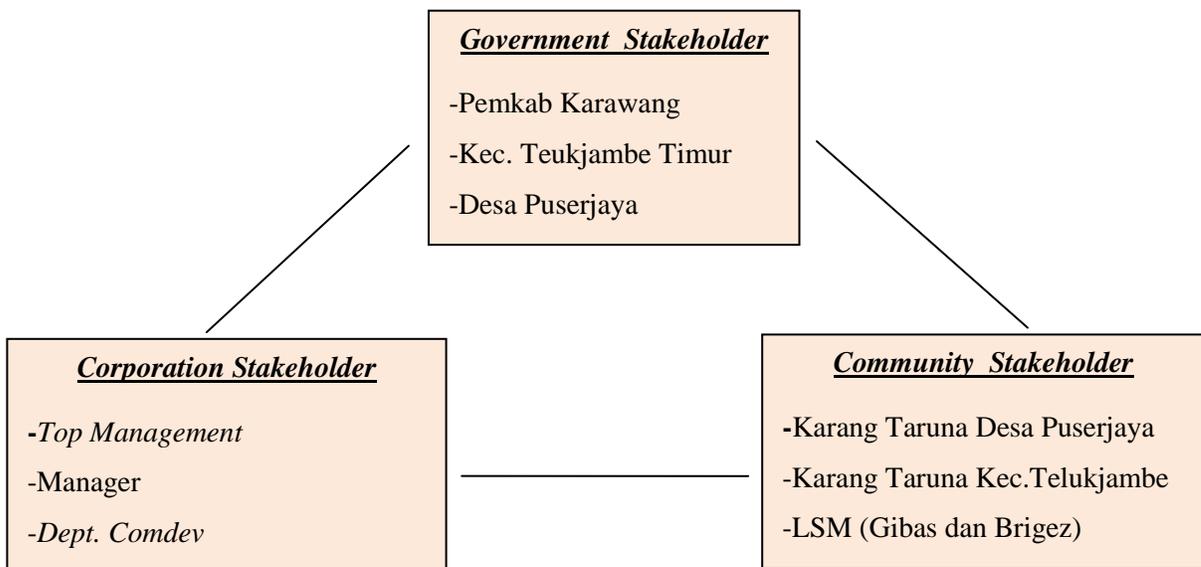
Tabel 4.4 diatas menggambarkan jika peran dari masing-masing elemen *stakeholder* (*corporation stakeholder, government stakeholder dan community stakeholder*) terkait program *comdev* berbeda satu sama lain. Hal tersebut diakibatkan karena setiap elemen *stakeholder* memiliki kepentingan yang berbeda terkait pelaksanaan program *community development*. *Corporation Stakeholder* dalam hal ini management PT. T memiliki peran yang menginginkan adanya keberlangsungan usaha yang aman tanpa ada gangguan dari masyarakat sekitar. Terlebih lagi, perusahaan akan berencana melakukan perluasan areal pabrik ditahun 2010. Oleh karena itu peran dari perusahaan terhadap pelaksanaan program *comdev* sangat penting, karena perusahaan sebagai subyek yang melaksanakan program sosial perusahaan di Desa Puserjaya dan menentukan arah program serta strategi kebijakan pelaksanaan program.

Sementara itu peran dari *government stakeholder* yakni sebagai supervisi pelaksanaan program *comdev* yang dijalankan oleh perusahaan. Sedangkan *community stakeholder* juga memegang peranan penting dalam program *comdev*. Hal ini disebabkan karena *community stakeholder* berperan sebagai obyek sekaligus subyek dari pelaksanaan program *comdev*. Pergeseran paradigma perusahaan terhadap komunitas lokal memang telah merubah strategi dan fokus sasaran program yang cenderung menempatkan komunitas lokal sebagai sasaran atau obyek utama. Selain sebagai obyek, komunitas lokal Desa Puserjaya juga berperan sebagai subyek.

Hal ini terjadi karena perusahaan melibatkan komunitas lokal (karang taruna Desa Puserjaya dan karang taruna Kecamatan Telukjambe) dalam implementasi program *comdev*, mulai dari mapping, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi program. Perbedaan peran yang dimainkan oleh masing-masing elemen *stakeholder* terhadap pelaksanaan program *comdev* di Desa Puserjaya, juga tidak bisa dilepaskan dari perbedaan posisi dari setiap elemen *stakeholder*.

Skema 4.1.

Identifikasi Posisi *Stakeholder* Terhadap Perusahaan Dalam Program *Comdev*



Sumber: Analisa Penulis tahun 2012

Skema 4.1. diatas memperlihatkan jika keberadaan perusahaan tidak bisa dilepaskan dari dua elemen *stakeholder* yaitu *government* dan *community stakeholder*. Skema tersebut menggambarkan posisi dari *government stakeholder* lebih tinggi dibandingkan dengan posisi korporasi dan *community stakeholder*. Hal ini sangatlah wajar mengingat pemerintah setempat memiliki regulasi dalam

mengatur kegiatan industri dan kegiatan dari komunitas lokal Desa Puserjaya. Selain itu, pada skema tersebut juga terlihat perbedaan hubungan antara perusahaan dengan *government stakeholder* dan perusahaan dengan *community stakeholder*.

Hubungan antara perusahaan dengan *government stakeholder* bersifat vertikal, sementara hubungan antara perusahaan dengan *community stakeholder* cenderung lebih bersifat horizontal. Perbedaan hubungan tersebut sangat menentukan peran dari masing-masing *stakeholder*. Dalam pelaksanaannya, posisi dari *government stakeholder* sebagai pihak yang meresmikan program *comdev* di masyarakat. Dalam arti, program-program yang dijalankan di masyarakat selalu diresmikan oleh pemerintah setempat, mulai dari pemerintah Desa Puserjaya, Kecamatan Telukjambe Timur hingga Bupati Karawang. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk “*positif image*” tidak hanya di lingkungan sekitar komunitas, melainkan juga di lingkungan pemerintahan.

D. Analisa Pergeseran Relasi Sosial Korporasi Terhadap Komunitas

Relasi sosial yang terjadi antara perusahaan dengan *government* dan *community stakeholder* mengalami proses panjang. Bahkan pola relasi sosial yang terjadi mengalami pergeseran, yang ditandai dengan penempatan komunitas lokal sebagai elemen *stakeholder* utama dalam pelaksanaan program *comdev*. George Ritzer dalam buku handbook teori sosial mengatakan jika “pada dasarnya, proses pertukaran dalam relasi sosial melibatkan aktor dan sumber daya dan partisipan

dalam teori pertukaran sosial disebut juga sebagai aktor”.³⁰ Aktor dapat berupa individu, kelompok dan perusahaan. Sementara itu, sumber daya merupakan kekayaan atau kecakapan perilaku yang dimiliki dan dihargai oleh aktor lain. Sumber daya dapat berbentuk materi dan non-materi. Sumber daya materi berupa harta kekayaan, sementara sumber daya non-materi berupa perilaku aktor yang dihargai dan di hormati oleh aktor lain.

Definisi sumber daya yang dijelaskan dalam menganalisis relasi sosial antara perusahaan dengan *community* dan *government stakeholder* yakni program *community development* PT. T. Relasi sosial antara korporasi dengan *stakeholder* bersifat dinamis. Secara umum, relasi sosial yang terjadi antara *government* dan *community stakeholder* dikategorisasi menjadi dua periode. Periode tahun 1989-2005, relasi sosial hanya melibatkan unsur perusahaan dengan pemerintah setempat yang mencakup pemerintah Desa Puserjaya, Kecamatan Telukjambe dan Pemerintah Kabupaten Karawang. Pada periode tersebut hubungan sosial antara perusahaan dengan komunitas lokal Desa Puserjaya kurang berjalan baik karena sasaran program dan fokus kegiatan lebih ditujukan untuk menjalin relasi dengan *government stakeholder*.

1. Gambaran Pola Relasi Sosial Korporasi Terhadap *Community* dan *Government Stakeholder* Periode 1989-2005

Relasi sosial korporasi periode tahun 1989-2005, melibatkan beberapa unsur elemen *stakeholder* antara lain *government stakeholder* dan *community stakeholder*

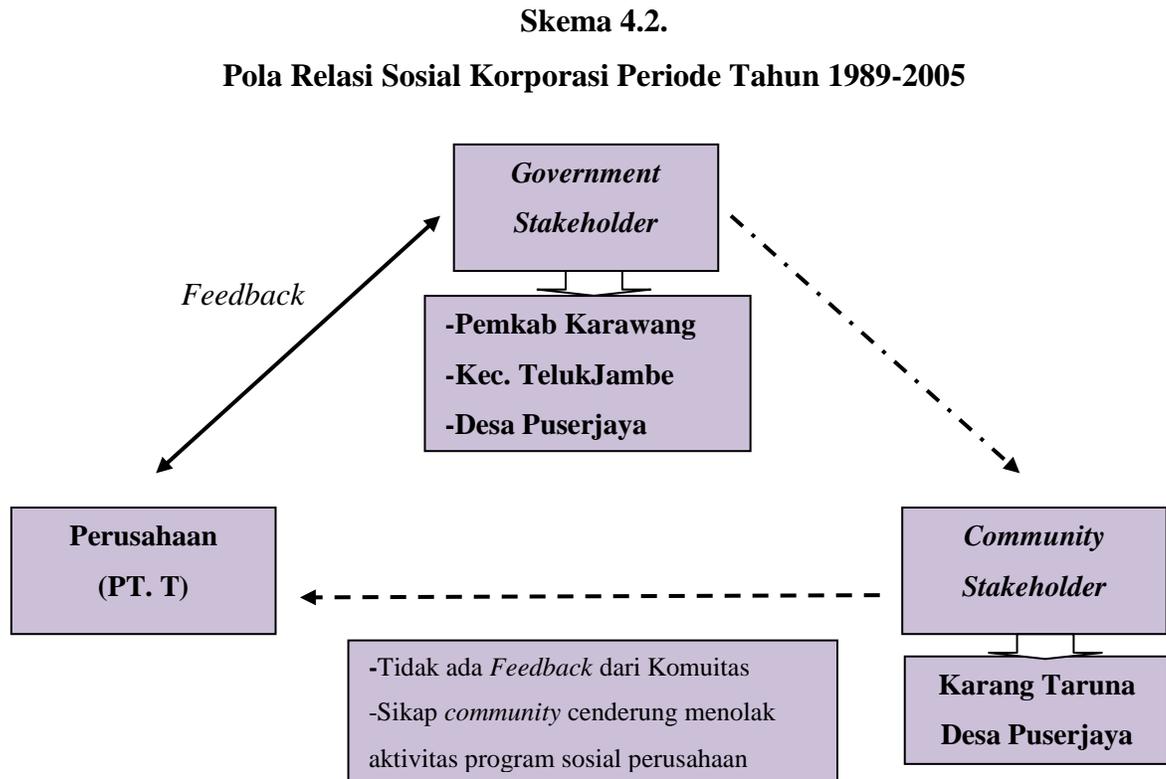
³⁰ George Ritzer, 2011, *Handbook Teori Sosial*, cet. pertama, Jakarta: Nusa Media, hal. 516.

(karang taruna Desa Puserjaya). Namun elemen *community stakeholder* dalam periode ini bersifat pasif, dalam arti perusahaan tidak melibatkan dan tidak berhubungan langsung dengan komunitas lokal baik dalam program *community development*. Hal ini disebabkan karena pada periode tersebut, fokus dari kegiatan sosial perusahaan hanya untuk menjalin relasi dengan pemerintah setempat. Program-program sosial yang ditujukan ke masyarakat juga di lakukan atau dikoordinasikan oleh pemerintah setempat (Desa Puserjaya), sehingga perusahaan tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan program *comdev* ke masyarakat atau komunitas lokal.

Hubungan antara perusahaan dengan ketiga elemen pemerintahan di kabupaten karawang (Pemkab Karawang, Kecamatan Telukjambe dan Desa Puserjaya) sudah berlangsung sangat lama, yakni sejak PT. T berdiri, perusahaan sudah mulai menjalankan kegiatan program sosial kemasyarakatan yang pada waktu itu masih bernama *community relation*, dengan tujuan untuk menjalin relasi dengan pemerintah. Kondisi tersebut dilakukan karena beberapa hal antara lain posisi pemerintah sebagai elemen *stakeholder* tertinggi akan memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan jika perusahaan mampu menjalin relasi dengan elemen pemerintahan di Kabupaten Karawang. Keuntungan tersebut antara lain mempermudah izin operasional pabrik dan perluasan area pabrik yang memang sudah diagendakan oleh perusahaan pembangunannya pada tahun 2010.

Hubungan antara perusahaan dengan *government stakeholder* yang sudah terjalin sejak tahun 1989 telah membentuk pola relasi antara perusahaan dengan

government stakeholder, serta perusahaan dengan *community stakeholder*. Pola relasi sosial tersebut tercermin dalam skema dibawah ini.



Sumber: Analisa Penulis Tahun 2012.

Skema 4.2. diatas menggambarkan pola relasi sosial yang terjadi antara perusahaan dengan *government stakeholder*, dan perusahaan dengan *community stakeholder*. Dapat digambarkan jika secara umum terdapat lima aktor besar yang terkategori menjadi tiga macam elemen aktor dalam pelaksanaan program *comdev* pada periode tahun 1989-2005. Ketiga aktor tersebut antara lain Perusahaan (PT. T), *Government Stakeholder* (Pemkab Karawang, kecamatan TelukJambe, dan Desa Puserjaya) serta *Community Stakeholder* (Karang Taruna).

a. Analisa Hubungan Sosial Perusahaan Terhadap *Government* dan *Community Stakeholder* Periode 1989-2005

Skema 4.2. diatas memperlihatkan jika terjadi hubungan sosial yang berbeda antara perusahaan dengan *government stakeholder* dan perusahaan dengan *community stakeholder*. Perbedaan hubungan tersebut didasari karena sumber daya yang diberikan, dalam hal ini program *community development* terhadap *government* dan *community stakeholder* mengalami kesenjangan. Hubungan antara perusahaan dengan *government stakeholder* bersifat intens sehingga terjadi “*feedback*” dalam hubungan tersebut. Sementara itu, hubungan antara perusahaan dengan *community stakeholder* berjalan tidak intens, dalam arti program-program sosial yang ditujukan ke masyarakat dijalankan melalui pemerintah setempat. Hubungan antara perusahaan dengan *government stakeholder* (Pekab Karawang, Kecamatan Telukjambe, Desa Puserjaya) bersifat timbal balik, dalam arti hubungan tersebut memberikan keuntungan baik bagi pemerintah maupun bagi perusahaan.

Hubungan timbal balik bagi perusahaan terciptanya hubungan yang harmonis dengan *government stakeholder*. Sementara disisi lain, hubungan antara perusahaan dengan komunitas lokal Desa Puserjaya tidak berjalan baik. Pelaksanaan program sosial perusahaan pada periode tahun 1989-2005, yang dilaksanakan melalui pemerintah setempat, berdampak kepada kurang harmonisnya hubungan antara perusahaan dengan *community stakeholder*. Hubungan yang terjadi bersifat timpang, dalam arti tidak ada timbal balik atau *reward* dari *community stakeholder* terhadap

perusahaan. Bahkan sikap dari komunitas lokal cenderung menolak program-program yang dijalankan oleh perusahaan karena program sosial tersebut tidak menjawab kebutuhan dan kepentingan komunitas lokal Desa Puserjaya. Periode 1989-2005, peran dan posisi pemerintah setempat masih sangat kuat, dalam arti pemerintah Desa Puserjaya masih bisa mengontrol kegiatan dari komunitas lokal seperti karang taruna.

Sementara di sisi lain, posisi tawar komunitas lokal (karang taruna) masih sangat lemah, sehingga masih belum mampu untuk mengoreksi relasi timpang yang selama ini terjadi. Implementasi program sosial perusahaan yang dijalankan pada periode tersebut bersifat “*charity*” (sumbangan sukarela) sehingga program tersebut tidak mampu menjawab kebutuhan, tuntutan dan permasalahan sosial dimasyarakat. Adapun bentuk program sosial yang dijalankan oleh perusahaan pada periode tahun 1989-2005 antara lain sponsor kegiatan pemerintah mulai dari Pemkab Karawang, Kecamatan Telukjambe, hingga Desa Puserjaya dan mendukung kegiatan program pemerintahan.

2. Pergeseran Pola Relasi Sosial Korporasi Terhadap *Community* dan *Government Stakeholder* Periode 2005-sekarang

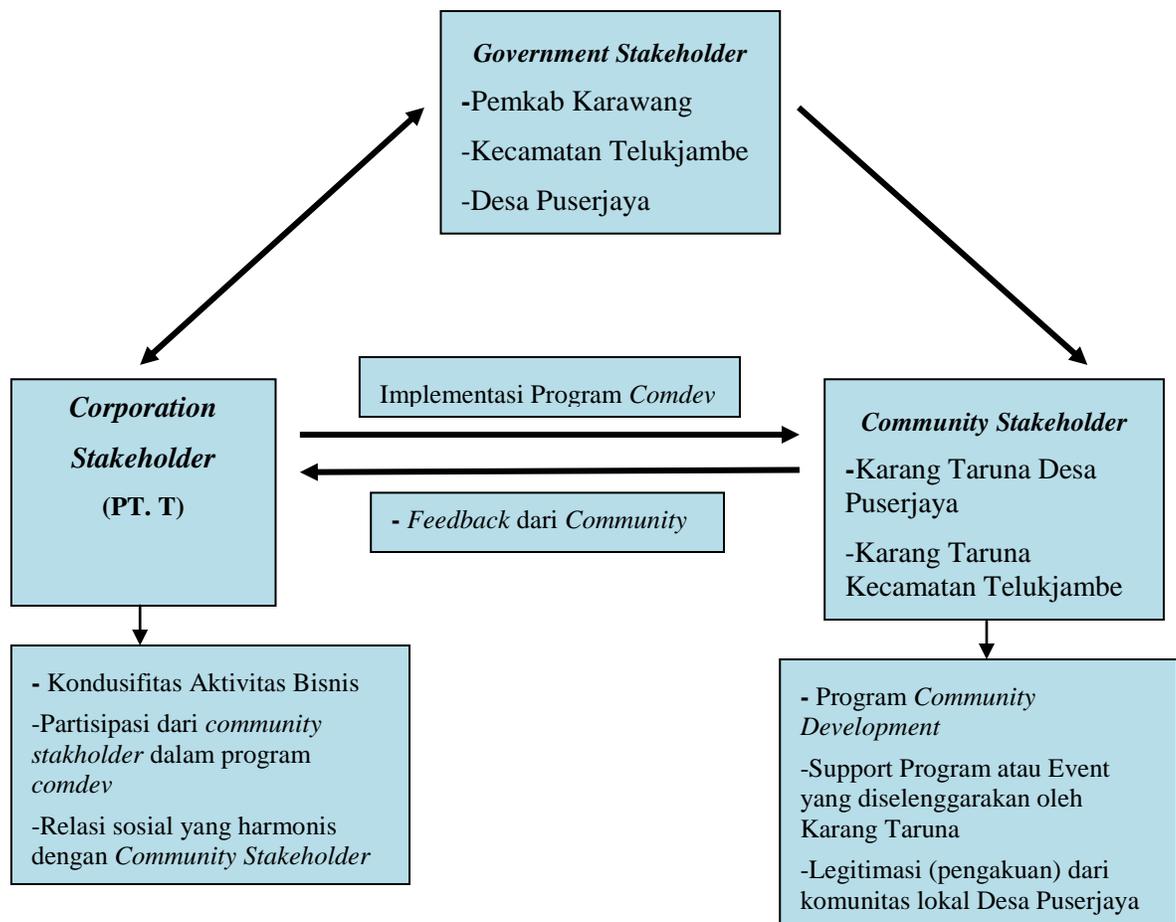
Relasi sosial yang terjadi antara perusahaan dengan elemen *stakeholder* di Desa Puserjaya bersifat sangat dinamis. Periode tahun 2005 terjadi pergeseran relasi dengan menempatkan komunitas lokal (karang taruna Desa Puserjaya dan Kecamatan Telukjambe) sebagai *stakeholder* utama. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran relasi sosial tersebut antara lain sebagai berikut, *pertama*

kurang efektifnya program sosial yang selama periode tahun 1989-2005 dijalankan perusahaan dengan menempatkan *government stakeholder* sebagai sasaran utama pelaksanaan program. Ketidakefektifan program tersebut disebabkan karena tidak merepresentasikan permasalahan sosial dan ekonomi yang ada di Desa Puserjaya. *Kedua*, timpangnya hubungan antara perusahaan dengan komunitas lokal Desa Puserjaya, dalam hal ini karang taruna. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya jika citra perusahaan dimata komunitas lokal Desa Puserjaya tidak terlalu baik, karena selama pelaksanaan program pada periode tahun 1989-2005, karang taruna sebagai komunitas lokal di Desa Puserjaya tidak dilibatkan dalam program *comdev*.

Selain itu, sikap *community stakeholder* terhadap perusahaan cenderung menolak. Kondisi ini tentu merugikan perusahaan karena sikap menolak yang ditujukan oleh komunitas lokal dapat menghambat keberlangsungan bisnis perusahaan, salah satunya melalui aksi protes. *Ketiga* semakin kuatnya posisi tawar komunitas lokal terhadap perusahaan. Menguatnya posisi tawar komunitas lokal menjadi faktor utama terjadinya pergeseran relasi sosial korporasi terhadap *community*. Hal ini ditandai oleh adanya afiliasi dan dukungan dari organisasi lain seperti Karang Taruna Telukjambe dan lembaga swadaya masyarakat (LSM Briges dan LSM Gibas). Hal tersebut berimplikasi terhadap tuntutan kepada perusahaan yang semakin meluas dan meliputi beberapa bidang antara lain bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, bidang sosial dan pemberdayaan komunitas.

Hal inilah yang membuat perusahaan merangkul elemen *stakeholder* di Desa Puserjaya, untuk menghindari aksi protes dari *community stakeholder* yang dapat mengganggu keberlangsungan bisnis perusahaan. Relasi sosial perusahaan pada periode ini lebih kental diwarnai oleh kepentingan, baik itu kepentingan perusahaan, kepentingan dari pemerintah setempat, dan kepentingan dari komunitas lokal Desa Puserjaya.

Skema 4.3.
Pergeseran Pola Relasi Sosial Korporasi Terhadap *Community*



Sumber: Analisa Penulis Tahun 2012.

Skema 4.3. diatas menggambarkan pergeseran pola relasi sosial yang terjadi antara perusahaan dengan *community stakeholder*. Pergeseran relasi sosial tersebut dapat digambarkan jika secara umum terdapat delapan aktor besar yang terkategori menjadi tiga macam elemen aktor dalam pelaksanaan program *comdev* pada periode tahun 1989-2005. Ketiga aktor tersebut antara lain perusahaan (PT. T), *government stakeholder* (Pemkab Karawang, kecamatan TelukJambe, dan Desa Puserjaya) serta *community stakeholder* (Karang Taruna Desa Puserjaya, Karang Taruna Kecamatan Telukjambe). Hubungan antara perusahaan dengan elemen *stakeholder* dapat dijelaskan sebagai berikut

a. Analisa Hubungan Sosial Perusahaan Terhadap *Community* dan *Government Stakeholder*

Relasi sosial korporasi terhadap *community* dan *government stakeholder* yang terjadi pada periode ini memang cenderung lebih dinamis. Hal ini disebabkan karena elemen *stakeholder* yang terlibat dalam program *community development* lebih banyak, begitu juga kepentingan dari masing-masing *stakeholder*. Perubahan kebijakan pelaksanaan program *comdev* dengan menempatkan komunitas lokal sebagai obyek sekaligus subyek dalam program *comdev* memang telah merubah pola relasi antara perusahaan dengan komunitas lokal Desa Puserjaya, dari yang semula menolak menjadi mendukung. Selain itu, pola relasi sosial pada periode ini cenderung transaksional dalam arti hubungan yang terjalin antara perusahaan dengan

government dan *community stakeholder* memang lebih dilatarbelakangi oleh kepentingan dari masing-masing elemen *stakeholder*.

Bagi perusahaan, program comdev yang selama ini diterapkan dianggap sebagai sebuah *cost* yang mesti mendapat *feedback* dari *community* dan *government stakeholder*. Salah satu *feedback* yang diinginkan yaitu terjalinnya hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar sehingga aktivitas produksi perusahaan tidak terganggu. Hubungan antara perusahaan dengan *government* dan *community stakeholder* dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5.
Identifikasi Hubungan Antar Elemen *Stakeholder*

No	Kategori Hubungan	Hubungan antar Elemen <i>Stakeholder</i>
1	Intens, Saling Mendukung	Perusahaan - <i>Community Stakeholder</i> (Karang Taruna) – <i>Government Stakeholder</i>
2	Kurang Intens, namun penting	Perusahaan – Kelompok Kepentingan (LSM Gibas dan LSM Brigez)

Sumber: Analisa Penulis Tahun 2012.

Tabel 4.5. diatas menggambarkan jika hubungan sosial yang terjadi antara PT. T dengan pemerintah dan komunitas lokal Desa Puserjaya terkategori menjadi dua macam yaitu hubungan intens, saling mendukung dan hubungan kurang intens, namun penting keberadaannya untuk diperhatikan. Kategorisasi hubungan tersebut didasarkan pada perubahan dari pelaksanaan program *community development* yang melibatkan berbagai unsur elemen *stakeholder*. Dari tabel di atas dapat diketahui jika hubungan antara perusahaan dengan *community stakeholder* (Karang Taruna) dan

government stakeholder bersifat intens dan saling mendukung. Artinya hubungan tersebut bersifat timbal balik yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Sementara itu dari tabel tersebut juga dapat diketahui jika hubungan antara *community stakeholder* (LSM Gibas dan Brigez) bersifat kurang intens tetapi penting keberadaannya untuk diperhatikan perusahaan.

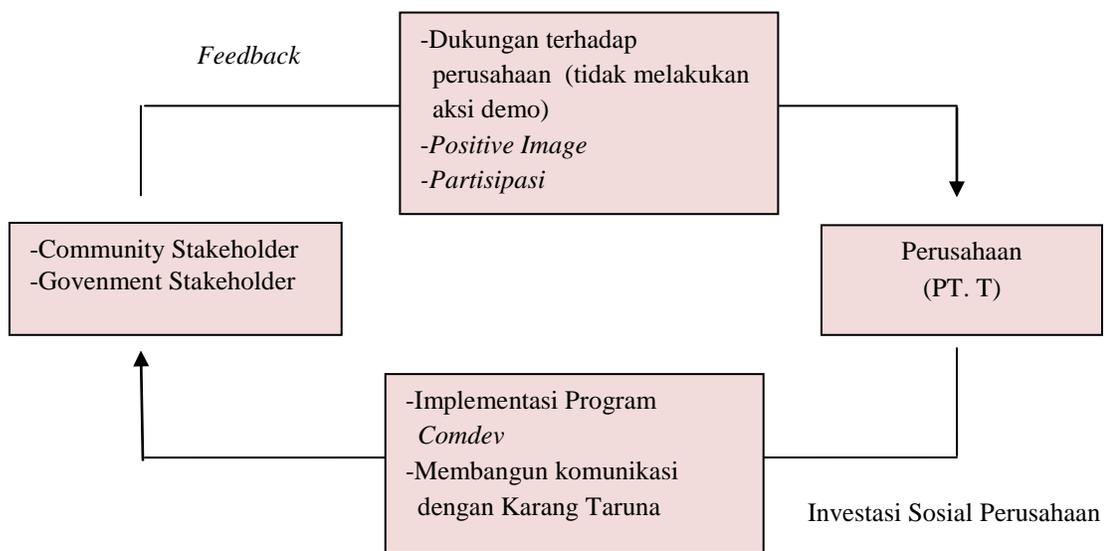
Hubungan antara perusahaan dengan *community* dan *government stakeholder* tersebut merupakan bentuk strategi perusahaan untuk meredam kelompok sosial yang berpotensi menekan perusahaan. Untuk itu, perusahaan melakukan pendekatan hubungan yang berbeda terhadap elemen *stakeholder* di Desa Puserjaya. Posisi tawar yang sangat strategis dari karang taruna desa puserjaya dan karang taruna kecamatan telukjambe memerlukan pola pendekatan yang berbeda dengan elemen *community stakeholder* lain seperti LSM Gibas dan LSM Brigez. Hal tersebut dilakukan untuk mempertimbangkan aspek keuntungan yang didapat oleh perusahaan, seperti adanya dukungan terhadap aktivitas produksi dengan tidak melakukan aksi protes sosial dan demonstrasi.

b. Analisa Pertukaran Sosial Dalam Relasi Sosial Korporasi Terhadap Komunitas

Hubungan sosial yang terjalin antara perusahaan dengan *government* dan *community stakeholder* telah membentuk suatu hubungan yang saling mengisi antara perusahaan dengan elemen *stakeholder* di lingkungan sekitarnya. Namun, hubungan tersebut didasari oleh tuntutan dan kepentingan dari masing-masing elemen

stakeholder. Program *comdev* yang dilaksanakan oleh perusahaan di Desa Puserjaya merupakan “*cost*” yang harus menguntungkan perusahaan secara sosial. Artinya program-program yang dilaksanakan di Desa Puserjaya, memiliki hubungan timbal balik atau kompensasi antara perusahaan dengan komunitas.

Skema 4.4.
Hubungan Perusahaan dengan Komunitas



Sumber: Analisa Penulis Tahun 2012.

Skema 4.4. di atas memperlihatkan jika terjadi hubungan timbal balik antara perusahaan dengan komunitas lokal Desa Puserjaya melalui pelaksanaan program *comdev*. Perusahaan (PT. T) menjalankan proram *comdev* yang terdiri dari tiga program yaitu program pendidikan dan ketenagakerjaan, program sosial kemasyarakatan, dan program pemberdayaan komunitas. Program *comdev* tersebut merupakan sebuah *cost* atau biaya sosial yang dikeluarkan oleh perusahaan guna menjalin relasi dengan *stakeholder*. Skema diatas memperlihatkan jika terjadi proses pertukaran sosial dalam hubungan antara perusahaan dengan *community stakeholder*.

Program *comdev* tersebut, sebagai investasi sosial mendapat *feedback* (umpan balik) dari komunitas seperti tidak mengganggu aktivitas produksi perusahaan melalui aksi demonstrasi. Hal ini dibuktikan sejak *community stakeholder* menjadi sasaran utama dalam program *comdev*, hubungan antara perusahaan dengan komunitas lokal menjadi harmonis.

Pergeseran relasi sosial yang dilakukan oleh korporasi terhadap *community stakeholder*, telah banyak merubah kebijakan pelaksanaan program *comdev* yang dilakukan oleh PT. T. Namun pelaksanaan program tersebut diwarnai oleh kepentingan dari masing-masing elemen *stakeholder*. Adanya rencana perluasan areal pabrik untuk menambah kapasitas produksi mobil, yang dilaksanakan pada tahun 2010, membuat perusahaan perlu menjaga relasi dengan *stakeholdernya*, terutama dengan komunitas lokal yang selama ini terabaikan guna menjaga kondusifitas kegiatan industri. Sementara disisi lain, permasalahan sosial yang ada di Desa Puserjaya dalam bidang pendidikan ketenagakerjaan, sosial dan pemberdayaan masyarakat tidak direspon oleh perusahaan dalam program *comdev* pada periode sebelumnya (1989-2005) dimana program yang dilaksanakan pada periode tersebut hanya bersifat sponsorsip bagi pemerintah.

Terlebih lagi masalah-masalah tersebut sering dilontarkan oleh komunitas lokal Desa Puserjaya guna menekan perusahaan untuk menjalankan program *comdev* yang sesuai dengan keinginan komunitas. Kondisi ini yang dicermati oleh perusahaan dengan melakukan pegeseran relasi, dengan menempatkan komunitas lokal desa

puserjaya sebagai sasaran utama dalam program *comdev*. Hal ini semakin menguatkan jika hubungan antara perusahaan dengan *community* dan *government stakeholder* bersifat kepentingan dan terjadi pertukaran sosial di dalam hubungan tersebut. Perusahaan membutuhkan hubungan yang harmonis dengan komunitas lokal untuk mengamankan bisnis korporasi dari gangguan masyarakat. Terlebih lagi adanya rencana perluasan pabrik untuk menambah kapasitas produksi, membutuhkan dukungan sosial dari masyarakat disekitarnya agar tidak mengganggu. Sementara disisi lain, *community stakeholder* (karang taruna) memiliki kepentingan terhadap perusahaan seperti pelibatan komunitas lokal dalam program *comdev*.

Mulai periode tahun 2005 hingga sekarang, komunitas lokal Desa Puserjaya dilibatkan dalam pelaksanaan program, mulai dari mapping, monitoring hingga evaluasi program. Selain itu, penyusunan program *community development* lebih diarahkan untuk menjawab kebutuhan komunitas lokal agar tercipta hubungan yang harmonis. Sikap dari *community stakeholder* yang tadinya menolak keberadaan perusahaan, berubah menjadi mendukung aktivitas perusahaan. Lebih dari itu, semakin intensnya hubungan antara perusahaan dengan komunitas lokal desa puserjaya, menciptakan hubungan timbal balik berupa *reward*.

C. Analisa *Reward* Dalam Hubungan Perusahaan dengan *Community* dan *Government Stakeholder*

Pada skema 4.3 dan 4.4. diatas, terlihat jelas jika masing-masing elemen *stakeholder* memiliki manfaat tersendiri dalam pelaksanaan program *community*

development. Bagi perusahaan, *reward* yang diterima oleh perusahaan dari *community* dan *government stakeholder* dengan dilaksanakannya program *comdev* antara lain tidak mengganggu aktivitas perusahaan melalui protes sosial dan demonstrasi. Semenjak komunitas lokal dilibatkan dalam program *comdev*, serta program yang dilaksanakan disesuaikan dengan kepentingan dari karang taruna desa puserjaya dan kecamatan telukjambe, aksi protes terhadap perusahaan yang dilakukan oleh komunitas lokal desa puserjaya sudah tidak terjadi lagi. Bahkan hubungan antara perusahaan dengan komunitas lokal menjadi harmonis dan saling mendukung.

Hal ini dibuktikan ketika terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Karang Taruna Desa Puserjaya dan Kecamatan Teukjambe pada tahun 2011 di wilayah KIIC, hanya PT. T saja yang tidak terkena aksi demo. Hal ini disebabkan karena T sejak tahun 2005 hingga sekarang sudah melaksanakan program *comdev* dengan melibatkan karang taruna sebagai subyek sekaligus obyek implementasi program *comdev*. Namun hubungan sosial antara perusahaan dengan *community stakeholder* menimbulkan ketimpangan, terutama dari segi *reward* yang diberikan dalam program *comdev*. Dalam skema 4.3 diatas terlihat jelas ketimpangan *reward* yang diperoleh oleh *community stakeholder*. Pada dasarnya, relasi antara perusahaan dengan komunitas lokal Desa Puserjaya telah menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.

Namun, hubungan tersebut tidak memberikan *reward* yang seimbang. Skema 4.3 diatas memperlihatkan jika perusahaan sangat diuntungkan karena masyarakat lebih banyak memberi kepada perusahaan. Bentuk pemberian komunitas lokal Desa Puserjaya mencakup tidak melaksanakan aksi demo dan legitimasi sosial terhadap perusahaan. Kondisi tersebut tentu sangat menguntungkan perusahaan karena pada dasarnya perusahaan melaksanakan program *comdev* adalah menciptakan kondusifitas bisnis yang akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi perusahaan. Sementara disisi lain, *reward* yang diterima oleh masyarakat tidak terlalu besar, bahkan komunitas lokal terkesan dijadikan “tameng” bagi perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan implementasi program *comdev* di tiga bidang yaitu pendidikan ketenagakerjaan, sosial masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang tidak sepenuhnya menguntungkan komunitas lokal Desa Puserjaya. Bahkan program *comdev* tersebut merupakan upaya perusahaan untuk meredam aksi protes dari komunitas lokal Desa Puserjaya.

Di bidang pendidikan ketenagakerjaan perusahaan memang memprioritaskan masyarakat Desa Puserjaya dalam perekrutan tenaga kerja lokal. Namun bidang kerja yang diberikan oleh perusahaan merupakan bidang kerja yang bersifat operator produksi bukan managerial. Hal yang sama juga terjadi dalam program pemberdayaan masyarakat. Meskipun secara riil perusahaan telah membuat program pemberdayaan masyarakat seperti usaha bengkel motor, usaha cuci steam dan usaha salon helm untuk komunitas lokal Desa Puserjaya, namun program pemberdayaan

tersebut merupakan upaya perusahaan untuk meminimalisasi expectation gap dalam bidang ekonomi sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial antara karyawan yang bekerja di perusahaan dengan masyarakat lokal Desa Puserjaya.

D. Analisa Kritis Pelaksanaan Program *Community Development* PT. T di Desa Puserjaya

Pelaksanaan program *comdev* yang dilakukan oleh PT. T, dengan melibatkan elemen *stakeholder* di Desa Puserjaya telah menciptakan suatu pola relasi antara perusahaan dengan *community* dan *government stakeholder*. Paparan diatas menggambarkan jika hubungan antara perusahaan dengan komunitas lokal bersifat relasi kepentingan dan transaksional, dalam arti program-program yang dijalankan oleh perusahaan lebih diarahkan untuk menjawab kepentingan dari komunitas lokal desa puserjaya. Carrol dalam Busyra Azheri “menjelaskan beberapa karakteristik tipe perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR-*Comdev* yaitu sikap reaktif, sikap proaktif, sikap defensif, sikap akomodatif dan sikap proaktif.³¹

Jika dilihat dari segi pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan, pelaksanaan program *comdev* PT. T di Desa Puserjaya masuk dalam kategori sikap akomodatif, dalam arti program *comdev* yang dijalankan merupakan representasi dari tuntutan dan masalah sosial ekonomi di Desa Puserjaya. Salah satu indikator tipe tanggung jawab sosial akomodatif yaitu terdapat kebijakan dari Top Management

³¹ Busyra Azheri, *Op. Cit.*, hal. 33.

terkait aktivitas sosial perusahaan dan kegiatan annual report tiap tahun dilaporkan secara internal.

Sikap akomodatif merupakan sikap yang cenderung merefleksikan permasalahan sosial di sekitar lingkungan perusahaan. Artinya, program *comdev* yang dijalankan merupakan cerminan dari pelaksanaan program *comdev* PT. T yang meliputi tiga bidang, yaitu pendidikan dan ketenagakerjaan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan komunitas lokal. Program pendidikan dan ketenagakerjaan merupakan bentuk respon perusahaan atas tuntutan dari komunitas lokal untuk lebih memberikan peluang bagi masyarakat lokal, bekerja di PT. T.

Perusahaan kemudian merespon dengan membuat program bursa kerja lokal dan pelatihan tenaga kerja untuk masyarakat di sekitar perusahaan. Namun, yang patut dikritisi dari pelaksanaan program *Comdev* PT. T yaitu adanya tujuan atau misi tersembunyi dibalik program-program yang dijalankan oleh perusahaan. Pergeseran relasi yang terjadi, dengan menempatkan komunitas lokal Desa Puserjaya sebagai *stakeholder* utama dalam pelaksanaan program *comdev*, lebih diarahkan untuk mengamankan bisnis korporasi dari aksi protes yang dilakukan oleh komunitas lokal.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika perusahaan pada tahun 2010 menambah kapasitas produksi dengan memperluas areal pabrik. Kondisi inilah yang menyebabkan perusahaan melakukan perubahan besar terhadap relasi sosial dengan *community* dan *government stakeholder*. Artinya, kegiatan *community development* yang dijalankan oleh perusahaan tidak menyentuh masyarakat Desa Puserjaya yang

benar-benar membutuhkan bantuan, tetapi program tersebut ditujukan untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan dari komunitas lokal untuk mencegah aksi protes dan demonstrasi. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap ketergantungan dari komunitas lokal Desa Puserjaya terhadap perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak dengan sungguh-sungguh memberdayakan masyarakat melalui program *community development*. Program *comdev* yang dilaksanakan cenderung mementingkan kepentingan dari korporasi yaitu menciptakan kondusifitas bisnis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi perusahaan.

E. Rangkuman

Paparan diatas menjelaskan mengenai relasi yang terjadi antara korporasi dengan *community* dan *government stakeholder*. Dari penjelasan diatas, dapat diketahui jika pola relasi yang terjadi antara perusahaan terhadap *community* terbagi ke dalam dua periode, yaitu periode 1989-2005 dan periode 2005 sampai sekarang. Periode tahun 1989-2005, hubungan antara perusahaan dengan komunitas lokal Desa Puserjaya tidak berjalan harmonis. Hal ini disebabkan karena pada periode tersebut, fokus dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan lebih diarahkan untuk menjalin relasi dengan *government stakeholder*. Sementara pada periode tahun 2005 sampai sekarang, terjadi pergeseran dalam relasi perusahaan dengan menempatkan komunitas lokal sebagai elemen *stakeholder* utama dalam pelaksanaan program *community development*.

Relasi yang terjadi antara perusahaan terhadap *community* dan *government stakeholder*, telah memberikan hubungan timbal balik berupa *reward*. *Reward* intrinsik yang diterima oleh perusahaan dari *community* dan *government stakeholder* dengan dilaksanakannya program *comdev* antara lain tidak mengganggu aktivitas perusahaan melalui protes sosial dan demonstrasi. Semenjak komunitas lokal dilibatkan dalam program *comdev*, hubungan antara perusahaan dengan komunitas lokal menjadi harmonis dan saling mendukung. Namun *reward* dalam hubungan antara perusahaan dengan *community stakeholder* menimbulkan ketimpangan. Perusahaan cenderung lebih diuntungkan dari hubungan antara korporasi dengan masyarakat. Keuntungan yang diperoleh perusahaan yaitu kondusifitas bisnis yang berujung kepada pertumbuhan ekonomi perusahaan. Sementara disisi lain, program *comdev* yang dijalankan oleh perusahaan hanya sekedar untuk menjaga perusahaan dari protes sosial dari masyarakat, sehingga kemandirian masyarakat tidak tercipta bahkan cenderung bergantung dengan perusahaan.